

January 2023

## PERSONAL FINANCIAL PLANNING (PFP) SEBAGAI IMPLEMENTASIPENGENTASAN FAKIR MISKIN DI INDONESIA

Kevin Exaudi Siregar

*Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia, kevin.exaudi@ui.ac.id*

Filicia Fiona

*Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi>



Part of the [Accounting Commons](#), [Arts Management Commons](#), [Business Administration, Management, and Operations Commons](#), [Business Analytics Commons](#), [Educational Administration and Supervision Commons](#), [Insurance Commons](#), and the [Tourism and Travel Commons](#)

---

### Recommended Citation

Siregar, Kevin Exaudi and Fiona, Filicia (2023) "PERSONAL FINANCIAL PLANNING (PFP) SEBAGAI IMPLEMENTASIPENGENTASAN FAKIR MISKIN DI INDONESIA," *Jurnal Vokasi Indonesia*: Vol. 10: No. 2, Article 3.

DOI: 10.7454/jvi.v10i2.1017

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol10/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Vokasi Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## **PERSONAL FINANCIAL PLANNING (PFP) SEBAGAI IMPLEMENTASI PENGENTASAN FAKIR MISKIN DI INDONESIA**

**Kevin Exaudi Siregar<sup>1</sup>, Filicia Fiona<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia,

*Corresponding Author's Email:* kevin.exaudi@ui.ac.id

### **ABSTRAK**

Fakir miskin pada hakikatnya merupakan sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan akses secara holistik untuk meningkatkan kondisi keuangan. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur bahwa fakir miskin berhak untuk meningkatkan kondisi keuangan yang *sustainable*. Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan teori perencanaan keuangan bagi fakir miskin dalam mendukung peningkatan tingkat literasi keuangan masyarakat sebagaimana komitmen tinggi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan penelitian ini adalah sebagai pemecah batas-batas tertentu yang menghambat fakir miskin dalam meningkatkan kondisi keuangan. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan analisis narasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan melalui *personal financial planning (PFP) theory* memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat fundamental kehidupan fakir miskin di tengah menghadapi kompetisi era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Dimana pada era tersebut kolaborasi yang masif dari berbagai pihak yang berkepentingan menjadi salah satu ciri khas. Melalui penelitian ini diharapkan fakir miskin perlahan dapat meningkatkan kondisi keuangan melalui proses pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan disertai peningkatan pengetahuan fakir miskin terhadap strategi perencanaan keuangan termasuk menentukan skala prioritas keuangannya dan menuju *financial freedom* serta sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan fakir miskin.

**Kata kunci:** PFP, fakir miskin, literasi keuangan

### **ABSTRACT**

*Paupers are essentially human resources who have limitations in utilizing the access holistically to improve financial conditions. Law Number (No). 13 of 2011 concerning Handling paupers stipulates that paupers have the right to improve their financial condition in a sustainable manner. This study explains the application of financial planning theory for paupers in supporting high commitment from the Financial Services Authority (OJK) to increase the level of literacy of paupers in financial literacy. The purpose of this research is to break certain boundaries that hinder paupers in improving their financial condition. The research method used is a qualitative approach with narrative analysis. The results of this study show that personal financial planning (PFP) theory has a significant impact in strengthening the fundamentals of the life of paupers in the midst of facing competition in the era of globalization and economic digitalization. Where in that era massive collaboration from various interested parties became one of the characteristics. Through this research, it is hoped that paupers will slowly improve their financial condition through the process of utilizing available resources accompanied by the increased knowledge on financial planning strategies including determining their financial priority scale and towards financial freedom as well as recommendations for the government in optimizing the handling of paupers.*

**Keywords:** PFP, paupers, financial literacy

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan persoalan yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam sebuah kemiskinan, terdapat sumber daya manusia (SDM) yang menjadi titik sentral dalam pengembangan pembangunan nasional. SDM menjadi ukuran dalam melihat kemajuan suatu negara, jika SDM memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi maka dapat menjadi indikasi negara tersebut adalah maju atau sedang menuju maju jika dalam konteks negara berkembang (Hasiani, 2016).

Dari segi sumber daya yang tersedia, Indonesia sangat kaya. Hal ini dapat didasarkan pada 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Melihat besarnya potensi yang akan dihasilkan oleh setiap daerah, pada realitanya sudah 77 tahun negara Indonesia merdeka, kekayaan sumber daya tersebut belum dimanfaatkan dengan maksimal menjadi sesuatu yang dapat diukur dengan nilai finansial. Terbukti, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 9,54% dari total populasi nasional. Dengan persentase penduduk miskin di

desa dan di kota, yaitu masing-masing 12,29% dan 7,50% (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tingkat kemiskinan dapat berkurang dengan signifikan jika dilandasi dengan rumusan kebijakan yang tepat dan relevan dari pemerintah bagi SDM yang terdampak langsung, dalam hal ini adalah fakir miskin. Menurut UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin merupakan SDM yang tidak memiliki akses untuk meraih sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang laik. Kebijakan maupun strategi pengurangan tingkat kemiskinan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama kurun waktu 8 tahun sejak Oktober 2014 telah menunjukkan relevansi solusi kebijakan dengan kondisi riil di tengah kehidupan fakir miskin.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Presiden Jokowi menggaet langkah penghapusan kemiskinan ekstrem di semua wilayah NKRI pada tahun 2024 dengan program yang koheren, serta kolaborasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah. Di antaranya ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar melakukan upaya dalam meningkatkan kondisi keuangan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas serta kepada Menteri Keuangan agar menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam mencapai konsekuensi Inpres.

Pada dasarnya, meningkatkan kondisi keuangan yang *sustainable* selain linier dengan urgensi Undang-Undang maupun peraturan kebijakan, juga selaras dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), seperti mengakhiri kemiskinan (*goal* 1), pekerjaan yang laik dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*goal* 8), dan pengurangan kesenjangan ekonomi (*goal* 10) akan mampu dicapai oleh negara Indonesia, jika berhasil memberdayakan dan membangun kesejahteraan fakir miskin. Karena terbatasnya akses dan belum optimalnya pengaktualan antar program pengentasan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah (Royat, 2016), relevan jika fakir miskin masih sebagai SDM yang terlantarkan. Hal ini tentu menghambat perkembangan fakir miskin dan semakin timpangnya kondisi perekonomian pada daerah di mana mereka tinggal.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah agar proses peningkatan kondisi keuangan fakir miskin dapat tercapai. Dalam memfokuskan kiat meningkatkan kondisi keuangan

diperlukan pemahaman perencanaan keuangan yang baik bagi fakir miskin. Perencanaan keuangan menjadi penting dikarenakan terdapat aspek edukasi di dalamnya. Fakir miskin yang memahami perencanaan keuangan secara holistik akan memiliki pengetahuan mengelola keuangan dengan baik, sehingga persoalan mendasar dalam pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan dengan terukur dengan disesuaikan pada skala prioritas keuangan fakir miskin.

Di tengah menghadapi kompetisi era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, fakir miskin harus dipersiapkan dengan perencanaan anggaran, perencanaan asuransi, perencanaan hari tua, perencanaan pendidikan anak, perencanaan pembelian rumah, dan laporan keuangan pribadi dalam rangka menjalankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam penunaian hak-hak pilar rakyat sesuai dengan kaidah SDGs, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (Perpres No. 18 Tahun 2020) dengan model kolaborasi yang lebih terfokus pada K/L, Pemerintah Daerah, dan mitra industri perencanaan keuangan.

Permasalahan yang dihadapi oleh fakir miskin, khususnya dalam meningkatkan kondisi keuangan perlu diatasi mengingat mereka turut menjadi bagian integral perekonomian Indonesia. Asa, kolaborasi, dan inovasi antara fakir miskin, K/L, Pemerintah Daerah, dan industri menjadi kunci untuk menjawab persoalan ini. Sehingga, kelak fakir miskin dapat menentukan secara mandiri skala prioritas keuangannya dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Based*) serta harapan ke depannya ketimpangan perekonomian pada setiap daerah dapat diminimalisir.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Fakir Miskin

Fakir miskin merupakan bagian integral dari negara Indonesia yang memiliki potensi bagi negara Indonesia untuk mencapai SDGs yang berkaitan dengan persoalan mendasar dalam perekonomian. Dimana pada kenyataannya mereka tidak memiliki akses dalam mencapai kebutuhan mendasar (Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2011). Sebuah petaka ketika SDM yang turut menjadi bagian terpenting dari suatu bangsa tidak memiliki kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2011 merupakan kebutuhan pokok diiringi dengan kebutuhan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Pemerintah telah mendudukan persoalan pengentasan kemiskinan dalam hal ini

diejawantahkan pada SDM yang menjadi sasaran, yaitu fakir miskin sebagai salah satu prioritas nasional (Irmayani dan Suradi, 2018). Konsekuensi yang berlaku dari hal tersebut adalah pemerintah dalam hal ini K/L melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* yang terlibat untuk mempercepat pengentasan fakir miskin (Inpres No. 4 Tahun 2022) dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab dari fakir miskin berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2011, yaitu:

1. Hak Fakir Miskin
  - a. Mendapat kecukupan kebutuhan pokok;
  - b. Mendapat pelayanan kesehatan;
  - c. Mendapat pendidikan;
  - d. Menerima perlindungan sosial;
  - e. Menerima pelayanan sosial;
  - f. Mendapat derajat kehidupan yang layak;
  - g. Mendapat lingkungan hidup yang sehat;
  - h. Meningkatkan kondisi keuangan yang *sustainable*; dan
  - i. Mendapat pekerjaan dan kesempatan berusaha.
2. Tanggung Jawab Fakir Miskin
  - a. Merawat identitasnya dengan berperilaku baik pada lingkungan berbangsa dan bernegara;
  - b. Menumbuhkan rasa kepedulian dan ketahanan sosial dalam lingkungan berbangsa dan bernegara;
  - c. Memberdayakan diri agar dapat meningkatkan kondisi keuangannya secara mandiri dan terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan; dan
  - d. Bekerja selaras dengan bakat yang dimiliki untuk yang memiliki kepiawaian.

Sasaran pengentasan fakir miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2011 dapat dilakukan dengan pemberdayaan, peningkatan keahlian, jaminan, dan kolaborasi serta koordinasi dengan *stakeholder*. Model yang relevan diterapkan saat ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan adalah dengan peningkatan dan penerapan lebih lanjut terkait literasi dan inklusi keuangan kepada fakir miskin dengan mengacu pada sasaran dalam Undang-undang yang berlaku. Mengacu pada survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, menunjukkan angka literasi dan inklusi keuangan masing-masing sebesar 38,03% dan 76,19%. Hal ini menunjukkan tren yang positif karena telah melebihi target pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

#### **PFP**

Perencanaan keuangan menurut *Financial Planning Standards Board* (FPSB, 2013)

merupakan proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Tujuan hidup termasuk membeli rumah, menabung untuk pendidikan anak atau merencanakan pensiun. Sementara dari sisi pandang profesi mendefinisikan PFP adalah mengembangkan dan mengimplementasikan secara total dan terkoordinasi perencanaan seseorang untuk mencapai tujuan keuangannya secara menyeluruh. Elemen terpenting dari konsep ini adalah mengembangkan perencanaan yang terkoordinasi untuk seluruh kebutuhan keuangan seseorang berdasarkan tujuan keuangan total mereka.

PFP memerlukan step yang dilangsungkan secara sistematis. Menurut FPSB, melalui step ini individu dapat memahami kondisi keuangan dan berpikir “*what*” tujuan keuangan ke depan yang dibutuhkan serta strategi dalam mencapainya. Step PFP, yaitu:

1. Mendefinisikan Hubungan dengan Klien,
2. Menentukan Tujuan dan Mendapatkan Data,
3. Analisa dan Evaluasi Status Keuangan,
4. Menyajikan Rekomendasi PFP,
5. Melakukan Implementasi PFP, dan
6. Memonitor PFP.

Setiap individu atau keluarga memiliki keunikan pada setiap implementasi rencana keuangan sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai keberhasilan keuangan (Ambarita, 2016). Tujuan hidup umumnya meliputi pernikahan, membayar pendidikan anak, memiliki rumah, perjalanan ibadah, dan memasuki masa pensiun dengan pertimbangan *what, how, dan why*. Dalam mencapai keberhasilan keuangan, perlu diketahui bahwa kehidupan dilanda dengan ketidakpastian (*human life risks*) yang ditandai dengan sakit kritis, hidup terlalu tua, dan meninggal dini serta persoalan *money risks* seperti tidak menabung/menabung tetapi gagal, inflasi, dan situasi darurat (Usriyono, 2022).

Dalam proses kehidupan, terdapat tiga level *financial stages*, yaitu *man at work, man and money at work, dan money at work*. Pada level *man at work* posisi dimana individu hanya mempunyai satu fokus penghasilan utama. Level *man and money at work*, individu mengusahakan nilai penghasilannya dapat bekerja supaya menghasilkan nilai penghasilan yang lebih tinggi. Langkah tersebut dapat dimulai dengan membuka usaha atau melakukan investasi. Pada level *money at work* merupakan posisi individu telah mencapai *financial freedom*. Dimana nilai penghasilan yang dimiliki telah bekerja secara terukur karena sudah terdapat bisnis atau aset yang menghasilkan keuntungan (Nur, 2021).

Tantangan era globalisasi dan digitalisasi ekonomi mengharuskan individu agar memiliki keahlian *smart budgeting*. Menurut *Associate Wealth Planner (AWP, 2022)* dari penghasilan yang dimiliki, prioritas *expenses* yang bijak adalah pertama, pos cicilan hutang maksimum 35%. Yang terdiri atas maksimum 15% hutang konsumtif dimana hutang konsumtif tidak akan membentuk aset (harta) karena nilainya terus menurun, contohnya adalah gawai. Serta minimum 20% hutang produktif. Hutang produktif akan membentuk aset (harta) yang nilainya akan selalu meningkat, misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), atau mampu memberi penghasilan setiap bulan. Kedua, pos premi asuransi minimum 10%. Asuransi jiwa memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bila pencari nafkah meninggal terdapat pergantian penghasilan bagi keluarga yang ditinggalkan,
  2. Bila pencari nafkah meninggal semua hutang lunas,
  3. Biaya-biaya akhir seperti tagihan media lunas,
  4. Bila pencari nafkah sakit kritis, biaya pengobatan dan perawatan dapat dibayar dan tersedia santunan bagi keluarga saat dia sedang sakit,
  5. Bila pencari nafkah cacat permanen terdapat pergantian penghasilan bagi keluarga, dan
  6. Rencana keuangan seperti persiapan dana pendidikan anak, dana beli rumah, dana pensiun, serta lainnya tetap berjalan.
- Ketiga, pos tabungan masa depan minimum 10% dari penghasilan dan di investasikan secara hati-hati untuk mendanai peristiwa terbaik. Keempat, pos belanja kebutuhan dan gaya hidup maksimum 45%. Menurut AWP (2021) terdapat 6 *advice PFP*, yaitu:

1. Perencanaan Anggaran,
2. Perencanaan Asuransi,
3. Perencanaan Hari Tua,
4. Perencanaan Pendidikan Anak,
5. Perencanaan Pembelian Rumah, dan
6. Laporan Keuangan Pribadi.

Dalam hal ini perlu memahami perencanaan dana dengan konsep Nilai Waktu Terhadap Uang (*Time Value of Money*). Menurut FPSB (2007), perhitungan *Time Value of Money* memakai formula sebagai berikut:

1. *Future Value of a Single Amount*

Merupakan *future value* yang dipakai guna mengukur *cash flow* di masa depan atas waktu ditentukan.

$$FV = PV \times (1 + i)^n$$

dengan,

*FV = Future Value of Single Amount*

*PV = Present Value of Single Amount*

*i = Suku bunga compounding*

*n = Periode berjalan*

2. *Present Value of a Single Amount*

Merupakan *present value* dari jumlah uang yang akan diterima di masa mendatang.

$$PV = FV \times (1 + i)^{-n}$$

dengan,

*PV = Present Value of Single Amount*

*FV = Future Value of Single Amount*

*i = Suku bunga compounding*

*n = Periode berjalan*

3. *Future Value of Ordinary Annuity*

Merupakan *future value* dari serangkaian pendapatan/pengeluaran berkala pada setiap akhir periode.

$$FVA = PMT \times \left[ \frac{((1 + i)^n - 1)}{i} \right]$$

dengan,

*FVA = Future Value Annuity*

*PMT = Annuity*

*i = Suku bunga compounding*

*n = Periode berjalan*

4. *Present Value of Ordinary Annuity*

Merupakan *present value* dari serangkaian pendapatan/pengeluaran berkala pada setiap akhir periode.

$$PVA = PMT \times \left[ \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right]$$

dengan,

*PVA = Present Value Annuity*

*PMT = Annuity*

*i = Suku bunga compounding*

*n = Periode berjalan*

5. *Future Value of Annuity Due*

Merupakan formula yang dipakai guna menghitung berapa banyak jumlah uang dari satu rangkaian pembayaran yang akan diterima di masa depan.

$$FVA = PMT \times \left[ \frac{((1 + i)^n - 1)}{i} \right] \times (1 + i)$$

dengan,

*FVA = Future Value Annuity*

*PMT = Annuity*

*i = Suku bunga compounding*

*n = Periode berjalan*

6. *Present Value of Annuity Due*

Merupakan formula yang dipakai guna menghitung berapa jumlah uang yang diperlukan

untuk membuat serangkaian pembayaran di masa depan.

$$PVA = PMT \times \left[ \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] \times (1 + i)$$

dengan,

$PVA = Present Value Annuity$

$PMT = Annuity$

$i = Suku\ bunga\ compounding$

$n = Periode\ berjalan$

### Metode SMART

Pada PFP, hal esensial yang harus diperhatikan adalah dalam menentukan *financial goals*. Metode SMART yang merupakan akronim dari *Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Based* dalam pengembangan yang dilakukan oleh Boise State University (2007) dapat memfokuskan *stakeholder* dalam upaya meningkatkan probabilitas untuk mencapai sebuah tujuan.

Menurut Corporate Finance Institute (CFI, 2022), metode SMART dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Specific*, yaitu *financial goals* harus diinterpretasikan dengan eksplisit,
2. *Measurable*, yaitu penentuan *financial goals* dilakukan dengan tolok ukur kemajuan dalam menggapainya,
3. *Attainable*, yaitu *financial goals* yang sudah ditentukan harus dapat dicapai,
4. *Relevant*, yaitu *financial goals* harus pada cakupan yang linier dengan tujuan kehidupan, dan
5. *Time Based*, yaitu *financial goals* harus memiliki linimasa agar terbangunnya urgensi.

Metode SMART dapat diimplementasikan pada individu atau K/L dalam mempersiapkan penyuksesan tujuan kehidupan/program dalam konteks PFP dengan objektif. Dengan demikian, target yang telah disusun berjalan baik dan dapat tercapai.

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Gutner (2022), metode penelitian kualitatif secara historis memiliki efektivitas dalam menawarkan perspektif yang berfungsi untuk menghasilkan hipotesis dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai suatu masalah atau sebuah fenomena. Dengan memperhatikan pendapat menurut Miles (2014), dalam penelitian ini metode kualitatif telah memberikan gambaran, penafsiran, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam

tentang berbagai hal yang berhubungan dengan objek penelitian yang dibahas.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan teori perencanaan keuangan bagi fakir miskin. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *library research* guna mempelajari, mengkaji, serta menelaah dari berbagai literatur, jurnal, buku, serta dokumen lembaga yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh sumber data dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian terkait penerapan teori perencanaan keuangan dalam mengoptimalkan penyelesaian persoalan pengentasan fakir miskin di Indonesia. Pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik analisis narasi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hubungan Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan

Literasi keuangan memiliki kaitan mengenai sebuah kemampuan individu dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan dapat diinterpretasikan sebagai suatu pengetahuan serta pemahaman mengenai konsep keuangan, keterampilan, dan kepercayaan diri individu dalam mengaplikasikan pengetahuan serta pemahaman yang telah disusun dalam pengambilan keputusan yang efisien dalam konteks keuangan seraya meningkatkan nilai guna keuangan dalam individu. Dengan adanya literasi keuangan maka inklusi keuangan juga dapat meningkat secara substansial.

Penelitian yang dilakukan oleh Grohmann dan Menkhoff (2020) di 143 negara telah menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya perlu ditingkatkan infrastruktur perbankan, tetapi yang terpenting adalah meningkatkan pengetahuan akan literasi keuangan bagi masyarakat sehingga sisi *demand* dapat ditingkatkan.

Penelitian yang telah dilakukan Sobaya et al. (2016) menjumpai adanya pengaruh yang substansial antara literasi keuangan dengan perencanaan keuangan. Oleh karenanya, seorang individu diharapkan memiliki *basic personal finance* yang telah meliputi berbagai pemahaman dasar individu pada sistem keuangan, seperti perhitungan bunga sederhana, bunga majemuk, *opportunity cost*, *time value*, serta aset likuiditas sehingga individu tersebut dapat melakukan perencanaan keuangannya secara efektif dan optimal.

#### Strategi Penerapan PFP pada Fakir Miskin

Berikut merupakan strategi menurut AWP yang dapat diterapkan oleh fakir miskin dalam melakukan PFP:

#### 1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran dapat melakukan prediksi atas pendapatan serta pengeluaran pribadi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan individu memiliki perencanaan anggaran, maka mereka akan dapat dengan mudah mengalokasikan sumber daya keuangannya ke berbagai perencanaan alokasi keuangan dan mampu mengelola arus kas bisnis dengan efektif. Konteks anggaran yang stabil harus dibangun di sekeliling anggaran induk dengan terdiri dari anggaran operasional, anggaran belanja modal, dan *cash budget*. Anggaran gabungan akan dengan mudah untuk menghasilkan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang dianggarkan.

#### 2. Perencanaan Asuransi

Keberadaan risiko merupakan sumber dari ketidaknyamanan bagi kebanyakan orang. Selain itu risiko merupakan sebuah ketidakpastian yang akan menyertai dan akan menyebabkan kecemasan serta kekhawatiran. Salah satu cara untuk mentransfer risiko adalah dengan memiliki perencanaan dalam berasuransi.

Asuransi merupakan alat perencanaan manajemen risiko keuangan yang berharga. Asuransi dapat mentransfer risiko keuangan yang akan menghambat kita untuk melakukan *personal financial planning*. Oleh karenanya, penting untuk memberikan edukasi asuransi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya fakir miskin mengingat pemahaman berasuransi di Indonesia masih tergolong rendah.

#### 3. Perencanaan Hari Tua

Menurut survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2020 jumlah kepesertaan dana pensiun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,96% atau sebanyak 41.935 orang. Padahal pada masa aktif seseorang dapat bekerja adalah rentang usia 22 sampai 58 tahun dan kebutuhan untuk hidup terus bertambah. Alhasil setelah melewati usia produktif, maka mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga bergantung pada orang lain karena tidak memiliki penghasilan, tabungan, ataupun jaminan pensiun.

Program pensiun merupakan langkah yang tepat untuk melakukan perencanaan hari tua. Program pensiun akan memberikan sejumlah uang setelah individu berhenti bekerja dikarenakan telah mencapai usia pensiun. Menabung merupakan langkah awal yang tepat dengan melihat pendapatan sekarang seraya menentukan kebutuhan hidup di hari tua nanti.

#### 4. Perencanaan Pendidikan Anak

Setiap orang tua akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, termasuk pendidikannya. Memaksimalkan minat serta bakat pada anak dengan memberikan pendidikan yang terbaik tentu

menjadi keinginan setiap orang tua. Oleh sebab itu, biaya pendidikan anak merupakan salah satu hal yang tidak bisa di lalaikan untuk dipersiapkan dan setiap orang tua harus memiliki pengetahuan mengenai perencanaan pendidikan anak.

Perencanaan pendidikan anak merupakan proses perencanaan untuk pendidikan dan masa depan anak. Dalam prosesnya melibatkan perencanaan untuk memahami jumlah yang dibutuhkan demi memenuhi persyaratan pendidikan anak secara memadai dan strategi perencanaan keuangan yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendapatan serta pengeluaran sehari-hari. Hal yang dibutuhkan untuk memiliki rencana yang baik dalam persiapan dana pendidikan, adalah kedisiplinan untuk tetap berpegang pada rencana dan selalu evaluasi kembali rencana dalam periode tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan individu.

#### 5. Perencanaan Pembelian Rumah

Memiliki rumah merupakan sesuatu yang di inginkan untuk masa depan setiap individu. Akan tetapi berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Housing Finance Center* (HFC), indeks harga rumah atau *house pricing index* (HPI) nasional mengalami kenaikan sebesar 5,24% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada kuartal I sebesar 2021 HPI berada di angka 179,02 sedangkan pada kuartal I tahun 2020 sebesar 170,12. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan perencanaan pembelian rumah.

Terdapat beberapa langkah awal yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pembelian rumah. Pertama, tentukan anggaran yang dimiliki untuk melakukan pembelian rumah. Kedua, turunkan rasio utang terhadap pendapatan. Ketiga, segera menabung untuk memberikan *down payment* (DP) rumah serta anggaran lainnya untuk pembelian rumah. Dengan adanya perencanaan, maka individu tidak akan mudah kesulitan dan perencanaan pembelian rumah akan tercapai.

#### 6. Laporan Keuangan Pribadi.

Laporan keuangan pribadi adalah serangkaian catatan yang menguraikan posisi keuangan individu pada titik waktu tertentu. Laporan keuangan pribadi biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu neraca pribadi dan bagian aliran pendapatan. Dalam bagian neraca dari laporan keuangan pribadi mencantumkan aset dan kewajiban individu, sedangkan bagian aliran pendapatan mencantumkan semua variabel yang mempengaruhi posisi keuangan individu. Laporan keuangan pribadi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam merencanakan keuangan seseorang. Biasanya berorientasi pada tujuan dan dapat membantu seseorang mencapai tujuan keuangannya.

## **Hambatan dan Tantangan Menjalankan Perencanaan Keuangan bagi Fakir Miskin**

### 1. Kurangnya Literasi Keuangan

*Organization for Economic Co-operation and Development* memanasifestasikan literasi keuangan sebagai perpaduan dari kesadaran keuangan, keterampilan, dan perilaku penting dalam memberikan suatu sikap dari keputusan keuangan yang sehat dan akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan bagi individu. Artinya literasi keuangan berhasil memberikan pemahaman yang diperlukan kepada individu untuk membuat keputusan yang tepat.

Banyak yang beranggapan bahwa orang yang tidak memiliki literasi keuangan biasanya termasuk dalam kelas berpenghasilan rendah. Mereka yang tergabung dalam sektor-sektor tersebut cenderung kurang terdidik dalam banyak aspek, termasuk pengelolaan keuangan. Padahal kurangnya literasi keuangan adalah faktor utama yang menghambat melakukan perencanaan keuangan yang baik tanpa memandang kelas sosial ekonomi seseorang.

### 2. Ketidakmampuan untuk Mengontrol Pengeluaran

Seseorang yang kurang memiliki literasi keuangan maka dapat dipastikan jika ia tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol keuangan secara efisien. Padahal jika mampu untuk mengontrol keuangannya, maka seseorang dapat menerapkan kebijakan, memantau dan mengontrol arah, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangannya dengan efektif.

Sebelum menerapkan strategi kontrol keuangan tetap dalam masing-masing individu, penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh semua skenario operasional yang mungkin terjadi. Hal ini akan membantu menetapkan kebijakan kontrol keuangan yang efektif yang mencakup semua aspek operasional individu.

### 3. Tidak Memiliki Tujuan Keuangan yang Jelas

Tujuan keuangan merupakan target yang harus dituju ketika mengelola keuangan. Jika suatu individu telah mempunyai tujuan keuangan yang terorientasi, maka tujuan keuangan akan memberikan efek yang sangat berdampak di berbagai bidang kehidupan dan akan memengaruhi kesejahteraan mereka. Ketika seseorang memiliki gambaran yang jelas mengenai hal yang seseorang tuju, maka seseorang dapat dengan mudah untuk menghadapi saat-saat ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam hidup.

Setelah menetapkan tujuan keuangan, mereka dapat menerapkan perilaku menabung. Berapa banyak yang harus ditabung tergantung pada tujuan keuangan pribadi. Dengan begitu, kelak fakir

miskin dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan dapat menentukan skala prioritas tujuan keuangannya sesuai dengan metode SMART.

## **Implementasi Pemerintah dalam Meningkatkan Pemahaman Perencanaan Keuangan bagi Fakir Miskin**

Pemerintah melalui OJK telah berkolaborasi dengan *stakeholder* untuk melakukan berbagai kegiatan yang akan meningkatkan pemahaman perencanaan keuangan khususnya bagi fakir miskin. Mengacu pada Keterangan Rencana Kota (K RK) diperoleh 310 aktivitas bimbingan literasi keuangan dan telah terealisasi sebesar 175 kegiatan dalam semester pertama 2020. Selanjutnya dari bidang pengawasan sektor IKNB mendapati 50 agenda kegiatan literasi dan sudah terealisasi 34 kegiatan literasi. Kemudian dari Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan (DLIK) terdapat 105 agenda kegiatan dan telah terealisasi sebesar 50 kegiatan literasi.

Kebijakan inklusi keuangan Bank Indonesia dan OJK merupakan bentuk perluasan dari *financial service deepening* yang mengarah pada masyarakat untuk ekonomi sosial dalam keterbatasan akses. Dengan begitu masyarakat dapat menggunakan produk serta jasa keuangan formal sebagai instrumen penyimpanan uang aman, transfer, simpan pinjam, dan asuransi. Sasaran program inklusi keuangan adalah tersedianya layanan keuangan bagi berbagai lapisan masyarakat, dengan melakukan fokus utama kepada masyarakat miskin, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, serta penduduk di daerah terpencil.

Mengacu pada POJK No. 76/POJK.07/2016 para Pelaku Usaha Industri Jasa Keuangan (PUJK) turut ikut andil dalam melakukan edukasi literasi keuangan untuk masyarakat. Oleh karenanya, pada tahun 2020 PUJK telah melakukan rencana kegiatan edukasi sebesar 2.602 kepada masyarakat, khususnya bagi fakir miskin yang masih sangat minim akan pemahaman mengenai perencanaan keuangan.

Adanya dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia, maka OJK juga mengeluarkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Program ini bertekad dalam penyediaan jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya dengan kerjasama dari *stakeholder* dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam pelayanan jasa. Program Laku Pandai diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia. Program ini bertekad dalam menyediakan produk keuangan yang efisien, mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, serta dapat menjangkau kebutuhan masyarakat dalam bidang



layanan keuangan dan kegiatan ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan antar daerah di Indonesia.

Berikut merupakan berbagai solusi konkret dari K/L, Pemerintah Daerah serta industri perencanaan keuangan sesuai tugasnya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

**Tabel 1. Solusi Konkret K/L, Pemerintah Daerah, dan Industri Perencanaan Keuangan untuk Mengurangi Kemiskinan Ekstrem**

No.	Nama K/L, Pemerintah Daerah, dan Industri Perencanaan Keuangan	Solusi Konkret Sesuai Tugasnya
1.	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pendekatan lingkungan simultan dan terintegrasi dalam implementasi program percepatan mengurangi kemiskinan.
2.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Melakukan optimalisasi dan stabilitas program logistik sembako dan kebutuhan pokok.
3.	Menteri Dalam Negeri	Menfasilitasi pengembangan wilayah Bitung-Minahasa-Manado.
4.	Menteri Sosial	Percepatan transparansi pencairan bansos.
5.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Perluasan akses sasaran Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
6.	Menteri Agama	Memberikan bantuan operasional dalam pengembangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bidang pendidikan keagamaan.
7.	Menteri Kesehatan	Menyalurkan Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Program Keluarga Harapan.
8.	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Memfasilitasi dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga fakir miskin.
9.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu.
10.	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Adanya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
11.	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Meninjau serta mewujudkan sinkronisasi serta implementasi kebijakan reforma agraria yang lebih berkeadilan.
12.	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Mewujudkan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
13.	Menteri Ketenagakerjaan	Intervensi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).
14.	Menteri Perindustrian	Memberikan bimbingan teknis wirausaha baru, pemberian bantuan mesin dan peralatan terkait.
15.	Menteri Pertanian	Menjalankan program bekerja bersinergi dan melakukan mobilisasi alat mesin pertanian.
16.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Merealisasikan program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya.
17.	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala	Mengembangkan pemberdayaan berupa stimulus

	Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	bantuan modal kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
18.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melakukan bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta program pemulihan lingkungan dan ekonomi.
19.	Menteri Keuangan	Bantuan sosial melalui program pengaman sosial kartu sembako.
20.	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Mereformasi penciptaan infrastruktur dan melakukan pengawasan pengendalian bantuan sosial.
21.	Menteri Badan Usaha Milik Negara	Melakukan penyaluran program bantuan beras PPKM.
22.	Menteri Komunikasi dan Informatika	Mengadakan <i>Thematic Academy</i> (TA) gratis guna meningkatkan keterampilan digital.
23.	Kepala Staf Kepresidenan	Melakukan diseminasi informasi mengenai hak lahan/tanah bagi fakir miskin.
24.	Panglima Tentara Nasional Indonesia	Melakukan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam program TMMD Reguler Ke 114 Kodim 0706/Temanggung.
25.	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	Menjamin hak konstitusional bantuan hukum gratis bagi fakir miskin.
26.	Kepala Badan Pusat Statistik	Menyelenggarakan survei efektivitas program bantuan sosial (SEPBS) dalam melakukan intervensi kemiskinan.
27.	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Melakukan substansi program gelar dagang dan pemberian makanan tambahan bagi balita <i>stunting</i> .
28.	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Optimalisasi percepatan program padat karya pada <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP).
29.	Para Gubernur	Memberikan Bantuan Rumah tidak Layar Huni (RTLH) dan paket sembako.
30.	Para Bupati/Wali Kota	Mengalokasikan anggaran berupa santunan atau zakat sosial kepada fakir miskin.
31.	FPSB Indonesia	Melaksanakan program pendidikan perencanaan keuangan dalam meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia.

Sebagaimana di amanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2011 pada poin f dalam pasal 2, yaitu dalam penanganan fakir miskin harus berasaskan pemberdayaan. Mengacu pada model konseptual dari Ron Meyer dan Ronald Meijers (2021) dimana penerapan pemberdayaan yang relevan dalam menangani fakir miskin adalah dengan memperhatikan tiga kategori utama tindakan manajemen yang memberdayakan.

Pertama, *entrust*, dimana K/L, Pemerintah Daerah, dan industri perencanaan keuangan memegang prinsip bahwa setiap fakir miskin adalah manusia kreatif yang tidak memiliki akses. Berangkat dari prinsip tersebut, bersama *stakeholder* terkait akan memberi kepercayaan kepada fakir miskin untuk memutuskan model pelaksanaan sesuai Inpres No. 4 Tahun 2022 yang akan mereka kembangkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan fakir miskin. Dalam prosesnya, *stakeholder* akan merangsang fakir miskin untuk bertindak SMART sesuai relevansi dengan model pelaksanaan yang sudah ditentukan sehingga tercapainya akuntabilitas untuk mencapai hasil.

Kedua, *enable*, dengan berkolaborasi antara *stakeholder* terkait untuk menganalisis kategori *enable* pada setiap rencana model pelaksanaan yang akan dilakukan oleh fakir miskin. Hal ini bisa di analisis dengan variabel sebagai berikut:

- a. *Resources*, bersama *stakeholder* terkait akan memastikan fakir miskin memiliki keterampilan dan pengalaman yang tepat, cukup waktu dalam mengelola model pelaksanaan pemberdayaan, informasi, dan koneksi dalam pelaksanaannya, dan
- b. *Roadblocks*, bersama *stakeholder* terkait bersedia untuk memberikan saran, memecahkan masalah, menyelesaikan konflik, dan mengelola *stakeholder*, sehingga fakir miskin dapat bergerak maju dengan model pelaksanaan pemberdayaan yang ditentukan.

Ketiga, *engage*, bersama *stakeholder* terkait akan melakukan *rally* dan *recognize*. Di mana dalam *rally* akan dilihat gambaran besar dari setiap pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh fakir miskin, agar nantinya *stakeholder* akan menunjukkan bagaimana tugas fakir miskin dalam pelaksanaan pemberdayaan sesuai dengan sasaran awal dan mencoba membangun dukungan serta antusiasme fakir miskin untuk mewujudkan tujuan dari Inpres No. 4 Tahun 2022. Dengan demikian, *recognize* yang dilakukan harus memberikan umpan balik yang konstruktif tentang bagaimana kinerja fakir miskin, menunjukkan penghargaan, dan mendorong fakir miskin untuk bergerak maju.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada

bulan Maret 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Maret 2021 sebesar 0,6 persen. Dengan awal presentase tercatat oleh BPS pada bulan Maret 2022 sebesar 9,54% dan pada bulan Maret 2021 sebesar 10,14%. Berdasarkan data yang telah tercatat bahwa program-program dari K/L, Pemerintah Daerah serta industri perencanaan keuangan telah berhasil menekan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia secara signifikan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 masing-masing menunjukkan angka literasi dan inklusi keuangan sebesar 38,03% dan 76,19%. Sedangkan pada tahun 2016 masing-masing menunjukkan angka literasi dan inklusi keuangan sebesar 29,7% dan 67,8%. Dari hasil survei yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa angka literasi dan inklusi keuangan mengalami peningkatan pada persentase tahun 2016 masing-masing sebesar 8,33% dan 38,16%.

## SIMPULAN

Untuk meningkatkan kondisi keuangan fakir miskin menuju *financial freedom*, diperlukan solusi untuk mengatasi masalah aksesibilitas, pelaksanaan solusi konkret K/L, Pemerintah Daerah, dan industri perencanaan keuangan yang belum dilakukan dengan maksimal, serta meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan bagi fakir miskin. Melalui PFP, ketiga permasalahan itu dapat diatasi.

Masalah aksesibilitas dapat diselesaikan dengan cara merekonstruksi kebijakan pemerintah terkait peningkatan kondisi keuangan fakir miskin dengan model pelaksanaan sesuai Inpres No. 4 Tahun 2022 dalam pemberdayaan yang berkelanjutan melalui kolaborasi *stakeholder*. Masalah pelaksanaan solusi konkret K/L, Pemerintah Daerah, dan industri perencanaan keuangan yang belum dilakukan dengan maksimal serta meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan bagi fakir miskin dapat diselesaikan dengan pelaksanaan solusi konkret dari *stakeholder* sesuai dengan tugasnya yang terintegrasi dengan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga, fakir miskin ke depan dapat produktif dengan pengembangan model pelaksanaan tersebut yang relevan dengan mengedepankan kolaborasi bersama *stakeholder* terkait, serta fakir miskin mencapai *financial freedom* dengan metode SMART dalam proses PFP.

## SARAN

Pada masa mendatang, pemerintah diharapkan dalam menyusun kebijakan dapat berekspansi: tidak hanya dalam hal mengembangkan fakir miskin yang terfokus kepada masyarakat miskin secara umum, tetapi juga terhadap

perempuan miskin dan kaum disabilitas sesuai dengan urgensi dari SDGs, sehingga pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia dapat tercapai dengan optimal, memandang ekualitas, dan konkret.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulial Hikmah, S.Si., M.Si., selaku Kepala Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia yang telah memberikan kepercayaan, arahan, dan landasan ilmu kepada penulis sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, I. (2016, July). *Financial Planning*. Retrieved from ResearchGate: [https://www.researchgate.net/publication/325074109\\_PERENCANAAN\\_KEUANGAN\\_FINANCIAL\\_PLANNING](https://www.researchgate.net/publication/325074109_PERENCANAAN_KEUANGAN_FINANCIAL_PLANNING)
- Anugrah, N. (2021, April 12). *Menteri LHK ke Dumai, Bawa Program Pemulihan Lingkungan dan Ekonomi*. Retrieved from [menlhk.go.id](http://menlhk.go.id): [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3858](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3858)
- Arief Yulianto, D. (2018). Financial Literacy In Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, 40-43.
- BKKBN, H. (2022, August 4). *Gelar Dagang dan Bantuan Makanan Tambahan untuk Balita Stunting Warnai Rakernas BPP AKU*. Retrieved from [bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id): <https://www.bkkbn.go.id/berita-gelar-dagang-dan-bantuan-makanan-tambahan-untuk-balita-stunting-warnai-rakernas-bpp-aku>
- BUMN, K. (2021, August 12). *Misi Program Bantuan Beras PPKM Selesai, Lanjut Tahap II*. Retrieved from [bumn.go.id](http://bumn.go.id): <https://bumn.go.id/post/misi-program-bantuan-beras-ppkm-selesai-lanjut-tahap-ii>
- Daily, M. (2022, April 18). *Bupati Tapsel Serahkan Bantuan ke Fakir Miskin*. Retrieved from [metrodaily.jawapos.com](http://metrodaily.jawapos.com): <https://metrodaily.jawapos.com/sumut/18/04/2022/bupati-tapsel-serahkan-bantuan-ke-fakir-miskin/>
- Efri. (2021, December 11). *Perjuangkan hak Rayat Miskin, H.Ruhimat Temui Kepala Staf Kepresidenan*. Retrieved from [portalberita.co.id](http://portalberita.co.id): <https://portalberita.co.id/heri-pb/11/12/2021/perjuangkan-hak-rayat-miskin-h-ruhimat-temui-kepala-staf-kepresidenan/>
- Financial Planning Standards Board (FPSB). (2007). *Fundamental of Financial Planning*. Jakarta: CFP.
- Firmansyah, R. (2021, April 26). *Rata-rata Harga Rumah Nasional Naik 5,24 Persen di Awal 2021*. Retrieved from [kumparan.com](http://kumparan.com): <https://kumparan.com/kumparanbisnis/rata-rata-harga-rumah-nasional-naik-5-24-persen-di-awal-2021-1vcswYOUj8f/full>
- FPSB Indonesia. (2013, July 15). *FPSB Indonesia*. Retrieved from <http://www.fpsbindonesia.org/publik-media#:~:text=Perencanaan%20keuangan%20menurut%20Financial%20Planning,se cara%20ter%20Integrasi%20dan%20terencana>.
- Grohmann, Menkhoff. (2020). The Relationship between Financial Literacy and Financial Inclusion.
- Gutner. (2022). *Comprehensive Clinical Psychology (Second Edition)*. Canada.
- Haryanto. (2022, April 19). *Tekan Kemiskinan di Jateng, Ganjar Masifkan Bantuan RTLH*. Retrieved from [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com): <https://mediaindonesia.com/nusantara/487042/tekan-kemiskinan-di-jateng-ganjar-masifkan-bantuan-rtlh>
- Hasiani, F. (2016). ANALISIS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI. *JOM FEKON Universitas Riau*, 1-15.
- Indonesia, P. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Jakarta.
- Indonesia, P. (2016). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. Jakarta.
- Indonesia, P. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- Indonesia, P. (2022). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang*

- Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. Jakarta.
- Institute, C. F. (2022, May 7). *SMART Goals*. Retrieved from <https://corporatefinanceinstitute.com/>: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/smart-goal/>
- Jateng, H. P. (2017, June 6). *BANTUAN DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN*. Retrieved from [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id): <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bantuan-dari-kementerian-perindustrian/>
- Kaltim, K. B. (2022, August 9). *Optimalisasi Program Padat Karya dalam Pelaksanaan APP Tahun 2022*. Retrieved from [bpkp.go.id](http://bpkp.go.id): <https://www.bpkp.go.id/kaltim/berita/read/37286/0/Optimalisasi-Program-Padat-Karya-dalam-Pelaksanaan-APP-Tahun-2022.bpkp>
- Kementerian Desa, P. D. (2020, April 26). *BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MULAI DISALURKAN*. Retrieved from [kemendesa.go.id](http://kemendesa.go.id): <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3245/bantuan-langsung-tunai-dana-desa-mulai-disalurkan>
- Kemnaker, B. H. (2021, October 15). *Menaker Ida Paparkan Upaya Turunkan Kemiskinan Ekstrem*. Retrieved from [kemnaker.go.id](http://kemnaker.go.id): <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-paparkan-upaya-turunkan-kemiskinan-ekstrem>
- Kesehatan, K. (2018, December 17). *Program Bantuan Sosial untuk Rakyat*. Retrieved from [kemkes.go.id](http://kemkes.go.id): <https://www.kemkes.go.id/article/view/18121800001/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat-.html>
- Keuangan, K. (2020, April 13). *PKH dan Kartu Sembako Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Rentan Miskin Terdampak COVID-19*. Retrieved from [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/pkh-dan-kartu-sembako-penuhi-kebutuhan-dasar-masya>
- Keuangan, O. J. (2016). *POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau masyarakat*. Jakarta.
- Keuangan, O. J. (2020). *HASIL SURVEI LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN NASIONAL MENINGKAT*. Retrieved from Sikapi Uangmu OJK: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>
- Keuangan, O. J. (2021, August). *Statistik Dana Pensiun*. Retrieved from [ojk.go.id](http://ojk.go.id): <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/dana-pensiun/Documents/Pages/Buku-Statistik-Dana-Pensiun-2020/BUKU%20STATISTIK%20DANA%20PENSIUN%202020.pdf>
- kodekiddo. (2022, July 1). *Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia & KodeKiddo*. Retrieved from [kodekiddo.com](http://kodekiddo.com): <https://kodekiddo.com/pelatihan-kementerian-komunikasi-dan-informatika-republik-indonesia-kodekiddo/>
- Larsen, J. E. (2015, November 15). *Who cares about and for marginal people?* Retrieved from ResearchGate: [https://www.researchgate.net/publication/253819948\\_Who\\_cares\\_about\\_and\\_for\\_marginal\\_people](https://www.researchgate.net/publication/253819948_Who_cares_about_and_for_marginal_people)
- Lazar, A. (2022, June 17). *How to Set S.M.A.R.T. Financial Goals (With Examples)*. Retrieved from [finmasters](http://finmasters.com): <https://finmasters.com/smart-financial-goals/>
- Luthfiana, N. (2021, December 21). *KKP Siapkan Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem*. Retrieved from [kkp.go.id](http://kkp.go.id): <https://kkp.go.id/artikel/36996-kkp-siapkan-kampung-nelayan-maju-dan-kampung-perikanan-budidaya-untuk-entaskan-kemiskinan-ekstrem>
- Meyer, R. (2021, March 1). *TIAS School for Business and Society*. Retrieved from TIAS School for Business and Society Web site: <https://www.tias.edu/en/item/empowerment-cycle>

- Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis : a Methods Sourcebook*. Sage Publishing, 485-487.
- Mineral, K. E. (2020, June 30). *Listrik Gratis Untuk Masyarakat Tidak Mampu, Ini Syarat dan Cara Pengaduannya*. Retrieved from esdm.go.id: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/listrik-gratis-untuk-masyarakat-tidak-mampu-ini-syarat-dan-cara-pengaduannya>
- Nasional, T. K.-1. (2020, November 25). *Kemenag Alokasikan Bantuan Pemulihan Ekonomi untuk Pendidikan Keagamaan*. Retrieved from covid19.go.id: <https://covid19.go.id/p/pemulihan-ekonomi-nasional/kemenag-alokasikan-bantuan-pemulihan-ekonomi-untuk-pendidikan-keagamaan>
- Negeri, K. D. (2022, August 1). *Pengembangan Wilayah Metropolitan Bimindo Butuh Sinergi dan Sinkronisasi*. Retrieved from kemendagri.go.id: <https://www.kemendagri.go.id/berita/read/33376/pengembangan-wilayah-metropolitan-bimindo-butuh-sinergi-dan-sinkronisasi>
- Nur, F. R. (2021, September 9). *3 Tingkatan Financial Stages*. Retrieved from BISNIKA.COM: <https://bisnika.hops.id/investasi/pr-3072148284/3-tingkatan-financial-stages>
- Perekonomian, K. K. (2017, August 26). *Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk Menurunkan Kemiskinan*. Retrieved from ekon.go.id: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1946/kebijakan-pemerataan-ekonomi-untuk-menurunkan-kemiskinan>
- Perekonomian, K. K. (2020, April 1). *Pemerintah Gulirkan Stimulus Ekonomi Guna Perkuat Perlindungan Sosial Terkait COVID-19*. Retrieved from ekon.go.id: <https://ekon.go.id/info-sektoral/17/31/berita-pemerintah-gulirkan-stimulus-ekonomi-guna-perkuat-perlindungan-sosial-terkait-covid-19>
- Pertanian, K. (2018, May 23). *Bedah Kemiskinan dan Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan*. Retrieved from pertanian.go.id: <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3210>
- PPN/Bappenas, K. (2018, January 10). *Melepas Jerat Kemiskinan dengan Program-Program Anti Kemiskinan Terintegrasi*. Retrieved from bappenas.go.id: <https://bappenas.go.id/id/berita/melepas-jerat-kemiskinan-dengan-program-program-anti-kemiskinan-terintegrasi>
- Prakash Kadu, M. P. (2021). A STUDY ON FINANCIAL LITERACY AND FINANCIAL PLANNING FOR INDIVIDUAL INVESTOR. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, 1213-1225.
- Royat, S. (2016). Government Policy on Poverty Alleviation. In M. K. Kemiskinan. Jakarta.
- Setiawan, K. (2022, April 12). *Mantan Atlet Dayung Ini Gunakan BLT Minyak Goreng untuk Modal Usaha Ikan Teri*. Retrieved from kemensos.go.id: <https://kemensos.go.id/index.php/Siaran%20Pers/92>
- Sobaya, Hidayanto, Safitri, J. (2016). *Pengaruh literasi keuangan dan lingkungan sosial terhadap perencanaan keuangan pegawai di universitas islam indonesia yogyakarta*. Madania: 1-14.
- Statistik, B. P. (2022, July 15). *Berita Resmi Statistik*. Retrieved from BPS Web site: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,50%20persen%20pada%20Maret%202022.>
- Statistik, B. P. (2022, January 31). *Dukungan BPS dalam Menekan Kemiskinan Ekstrem*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/news/2022/01/31/459/dukungan-bps-dalam-menekan-kemiskinan-ekstrem.html>
- Suradi, I. d. (2018). Poverty Alleviation Based on Data Integration in Semarang Manucipal. *SOSIO KONSEPSIA*, 1-13.
- Sutrisno. (2020, April 30). *Lima Skema Program Bantuan untuk UMKM Pariwisata*. Retrieved from analisadaily.com: <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/0>

- 
- 4/30/1005205/lima-skema-program-bantuan-untuk-umkm-pariwisata/  
TNI, P. P. (2022, August 9). *Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masih Berlanjut TNI Bersama Warga Bahu Membahu*. Retrieved from tni.mil.id: <https://tni.mil.id/view-217456-pembangunan-rumah-tidak-layak-huni-rtlh-masih-berlanjut-tni-bersama-warga-bahu-membahu.html>
- TNP2K. (2021, October 14). *BPUM Policy: Efforts to Maintain Micro Enterprises During the COVID-19 Pandemic*. Retrieved from [tnp2k.go.id](https://tnp2k.go.id): <https://tnp2k.go.id/index.php/articles/bpum-policy-efforts-to-maintain-micro-enterprises-during-the-covid19-pandemic>
- Turnip, A. H. (2021, October 14). *Bantuan Hukum Gratis sebagai Pemenuhan Akses Keadilan bagi Orang Miskin*. Retrieved from [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com): <https://www.kompasiana.com/aristonturnip/61655f6238350021d059c973/bantuan-hukum-gratis-sebagai-pemenuhan-akses-keadilan-bagi-orang-miskin>
- University, B. S. (2007, April 24). *Performance management-Creating SMART Objectives: Participant Guide*. Retrieved from <http://hrs.boisestate.edu/td/pdf/SMARTgoals.pdf>
- Usriyono, E. (2021). *Associate Wealth Planner*. Semarang: Oke Finansial Indonesia.
- Usriyono, E. (2022). *Associate Wealth Planner*. Semarang: Oke Finansial Indonesia.